

EDITORIAL

Penodaan dan Penafsiran

Perubahan dunia yang begitu cepat dan kompleks menimbulkan respon dan keresahan baru. Salah satu respon itu berlangsung di bidang keagamaan. Tumbuhnya agama baru, aliran kepercayaan, dan tafsir-tafsir baru adalah respon intelektual yang di bentuk untuk menjawab dahaga spiritual individu/kelompok tertentu masa kini.

Sayangnya, ajaran-ajaran baru itu, baik itu berupa agama/aliran kepercayaan, selalu ditandai sebagai penodaan dan penyimpangan. Sikap ini identik dengan penafian karya intelektual seseorang/kelompok.

Narasi mengenai penyimpangan membutuhkan sikap pelurusan yang ujungnya dilaksanakan melalui kekerasan fisik dan intimidasi. UU PNPS/1965 menegaskan sikap kekerasan seperti ini. Para pelakunya dituduh sebagai kriminal, pemimpinnya dituduh polisi, pengikutnya dibubarkan dengan paksa. Tidak jarang, rumah ibadah dan aset mereka dibakar dan dimusnahkan.

Rupanya kita belum beranjak dari narasi pelurusan dan penyimpangan. Padahal, keragaman bangsa ini bisa tumbuh karena kesadaran akan perbedaan. Yang dibutuhkan di tengah perbedaan-perbedaan ini adalah negara yang menyediakan ruang dialog dan musyawarah, bukan negara yang menciptakan hukum besi dan pengganyangan.

Redaksi

TEMPAT PENGAJIAN LDII DIBAKAR

Oleh: Munif Ibnu



SABDO KUSUMO

Saat jarum jam menunjukkan pukul 9 lebih 15 menit 6, Desember 2009, secara tidak terduga, di dusun Tlogowero itu terdengar suara gemuruh. Ratusan orang berdatangan seperti banjir bandang. Lalu, ratusan orang itu mengamuk dan membakar sebuah bangunan berukuran 12 X 8 meter.

Bangunan yang terbuat dari batu bata itu milik Pengurus Anak Cabang (PAC) jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Tepatnya, di RT 01 RW 01 Desa Tlogowero, Kecamatan Banaran, Kabupaten Temanggung.

Meski tak ada yang terluka, pembakaran masjid itu tentu saja membuat trauma bagi anggota LDII. Amin, misalnya, anggota LDII ini mengemukakan adanya beban psikologis yang dialami. “Banyak warga yang merasa terintimidasi,” katanya. Senada dengan Amin, Sriyono juga mengeluh seperti dilansir Suara Merdeka sehari setelah pembakaran, “Beberapa jamaah kami merasa ketakutan,” katanya.

Perusakan masjid LDII di Desa Tlogowero itu juga bukan yang pertama. Kejadian serupa pernah terjadi tahun 2007. Seperti yang diakui

INSIDE THIS ISSUE:

Desantara Report	1
Testimony	5
Local Community	6
Profile	7
Vox Vocis	8
Multicultural Women	9
Citizenship	10
Representation	11
Desantara's Activities	12

S U S U N A N R E D A K S I**Penanggung Jawab:**
M. Nurkhoiron**Pemimpin Redaksi:**
Muhammad Kodim**Sekretaris:**
Noviyana**Kuangan:**
Darningsih**Redaktur Pelaksana:**
Ingwuri H.**Tata Letak/Desain:**
M. Isnaini "Amax"**Editor Bhs. Indonesia:**
M. Nurkhoiron**Editor Bhs. Inggris:**
Becca Taufiq**Penerjemah:**
S. B. Setiawan**Staf Redaksi:**
Frandyta Utomo**Distributor:**
Noviyana**Dokumentasi:**
Rustam**Kontributor:**
Jawa Barat: Abu Bakar, Isa Nur Zaman, Diphie. **Jawa Tengah:** Moh. Sobirin. **Jawa Timur:** Mashuri, Oryza Ardyansyah W., Ishomuddin, A'ak Abdullah Al-Kudus, Ahmad Rifa'i. **Bali:** Ni Komang Erviani. **NTB:** Muhammad Irfam. **Sulsel:** Mubarak Idrus, Hasmi Baharuddin. **Sulteng:** Ewin Laudjeng. **Sulbar:** Tamsil Kanang. **Kaltim:** Asman Azis, Abdullah Naim. **Kalbar:** Chatarina P. Istiyani. **Sumbar:** Ka'bat. **Sumut:** Farid Aulia. **Aceh:** Raihana.**Alamat Redaksi:**
DESANTARA Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai Blok K3, Depok 16431
Website: www.desantara.org
Email Redaksi: mail@desantara.org, newsletter@desantara.org
(DEPORT)
Tlp: +62 21 77201121
Fax: +62 21 77210247ISSN 1979-7354
9 771979 735446

Yusuf, dulu sudah pernah terjadi tapi tak sampai ada pembakaran. Lalu, diadakan kesepakatan tertulis dan bermaterai. "Tapi perjanjian itu dilanggar," beber bapak berkumis tebal itu.

"Peristiwa itu harus dicerna dengan cermat mas," tutur Sarifudin saat ditemui kontributor Deport di rumah kediamannya. Apalagi, kedatangan massa seperti tak terduga sehingga susah dibendung.

Akibat kejadian itu, banyak pecahan genteng berceceran. Atap terbakar. Serpihan kaca berserakan dan potongan bambu. "Banyak tembok berlubang. Jumlahnya ada 11 lubang," lanjutnya. Akibat ulah orang yang tidak dikenal ini diperkirakan kerugiannya mencapai 60 juta. "Kami menghitungnya mencapai angka itu," kata Tukirman.

Wahyono mengatakan, bangunan yang dibakar biasanya digunakan untuk pengajian. Ia juga mengatakan banyak yang datang ke pengajian itu. "Kira-kira sudah empat bulan kegiatan ini berjalan," terangnya. "(Kami) membeli tanah dari bapak Didik Dwi Wardana," timpal Tukirman. Soal kejadian yang begitu cepat dan mendadak itu, Tukirman menyangka, "soalnya rumah itu dalam keadaan kosong."

Menanggapi aksi perusakan dan pembakaran ini, Yusuf Purwanto selaku orang 'dalam' Departemen Agama Temanggung menyatakan, "Ia bukan rumah ibadah. Namun, hanya rumah biasa

yang sering digunakan untuk kegiatan keagamaan," paparnya.

Kenapa masjid LDII dirusak? Tukirman menganggap, ini terjadi akibat disharmonis dalam masyarakat. "Adanya kecemburuan sosial segelintir antar individu yang berakibat munculnya perpecahan dan perselisihan."

Selain itu, pembakaran disinyalir karena telah terjadi kesalahan laporan oleh ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bansari ketika melapor ke Kakandepag (Kepala Kantor Departemen Agama).

Akibat kejadian itu, di sela-sela kesibukannya Bupati Hasyim Afandi pun menyempatkan meninjau lokasi. Beliau datang rombongan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Polres Temanggung.

Sedangkan ketua MUI Temanggung Jacob Mubarak mengemukakan bahwa sebaiknya kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. "Mari kita selesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan," pintanya. Secara terpisah, ketika ditanya apakah di Temanggung sering terjadi kekerasan? Yusuf menjawab, "Sepengetahuan saya tidak ada, baik secara intern maupun intra," bilanginya dengan nada optimis.

Lebih lanjut, sebenarnya masalah yang seperti ini yang berhak menanganinya masuk wilayah bagian Penerangan Agama dan Kemasjidan (Penamas). [D]



ALIRAN PUA IMMA' DAN NABI KHAIDIR DARI POLEWALI

Oleh: Suaib Amin Prawono

Di penghujung akhir Januari 2010, masyarakat Polewali, Mandar, Sulawesi Barat dihebohkan dengan munculnya aliran baru. Aliran tersebut bernama Aliran Pua Imma' yang dipimpin oleh Rizal alias Pua Imma' (40).

Aliran yang muncul sekitar setahun lalu itu di antaranya mengajarkan bahwa para pengikutnya boleh mengerjakan shalat hanya satu kali dalam sehari semalam dan menghadap ke selatan. Selain itu, meski menganjurkan mengerjakan shalat Jum'at, tetapi shalatnya dilaksanakan di sungai dengan bertelanjang dada.

Aliran Pua Imma' juga mengajarkan bahwa surga dapat dibayar dengan uang senilai empat juta rupiah. "Bagi yang ingin masuk surga, tak perlu taat dalam menjalankan ibadah serta memperbanyak amal cukup dengan membayar uang senilai empat juta rupiah," papar Pua Imma'.

Karuan, aliran ini pun mendapat vonis sesat dari MUI Polewali Mandar. Ia juga menjadi perhatian serius bagi kepolisian setempat. Pada tanggal 27 Januari 2010, Aliran yang muncul di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman ini pun kemudian digerebeg Polres Polman. Penggerebegan sendiri dipimpin oleh Kapolres Polman, AKBP I Gusti Ngurah Rai Mahaputra dengan alasan, kepercayaan aliran pua imma' dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Bukan hanya itu, praktek kepercayaan tersebut juga dinilai telah banyak meresahkan warga masyarakat. Saat digerebeg, Pua Imma' sudah mempunyai puluhan pengikut.

Penggerebegan sendiri berlangsung menegangkan karena sempat mendapat perlawanan dari Pua Imma' beserta pengikutnya. Perlawanan dilakukan dengan melempari batu dan mengancam Polisi dengan senjata tajam. "Saat penggerebegan, mereka melakukan perlawanan dengan senjata tajam (badik dan tombak) serta kami juga dilempari batu, dan waktu itu mata mereka juga melotot keluar, mereka

melakukan perlawanan dalam keadaan kesurupan, dan hampir saja membuat kami dan pihak kepolisian kewalahan menghadapi mereka," terang Andi Amir.

Andi Amir terlibat langsung penggerebegan. Warga Desa Mirring yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu bahkan ikut melakukan pengintaian selama tiga hari tiga malam membantu polisi. Ia mengintai bersama dua AKP Akbar dan AKP Salam.

Akhir kisah, karena jumlah petugas lebih banyak, pengikut aliran Pua Imma' pun menyerah dan sebagian melarikan diri melintasi perbukitan. Meski ada perlawanan, penggerebegan juga tak memakan korban di kedua belah pihak.

Penggerebegan sendiri dilakukan di sebuah bukit tempat Pua Imma' dan para pengikutnya melakukan acara-acara ritual. Dalam penggerebegan, polisi berhasil menangkap Pua Imma' beserta kelima pengikut setianya dan langsung digelandang ke kantor polisi setempat. Turut pula diamankan salah seorang pengikutnya bernama Syamsuddin (24) yang mengaku sebagai Nabi Khaidir.

Mengaku Nabi Khaidir

Andi mengatakan bahwa aliran Pua Imma' adalah aliran penipuan dan pemerasan yang pada mulanya dibawa oleh salah seorang buronan dari daerah Bone bernama Sudirman, "Yang membawa ajaran sesat ke Desa Mirring ini adalah Sudirman salah seorang warga Bone, padahal Sudirman kan buronan Polisi di Bone karena kasus penipuan".

Menurutnya, dari hasil tipuan dengan jaminan surga itu, Sudirman sempat mengantongi uang 105 juta rupiah. Andi juga mengatakan bahwa "Sebelum Sudirman diamankan oleh pihak kepolisian Rizal Pua Imma' sempat menjadi pengikutnya," katanya.

Andi juga membenarkan bahwa penyebaran ajaran dilakukan dengan



PARURU DAENG TAU

paksaan kepada warga, termasuk yang jadi korbannya adalah P3 dan Kepala Desa setempat, "Mereka (kades dan P3) dipaksa dan diancam dengan badik (senjata tajam) untuk mengikuti ajarannya, orang yang masuk ke dalam ajarannya terlebih dahulu di Islamkan dengan cara dimandikan air zamzam menurut keyakinannya," paparnya

Pengakuan yang sama juga datang dari Asrul salah seorang warga Binuang, Asrul mengatakan, "Iya memang benar, mereka sering mengancam warga di sini untuk mengikuti alirannya agar bisa dapat duit."

Asrul juga mengatakan ada juga warga yang tak dipaksa karena tertipu melihat penampilan Sudirman yang sering gonta-ganti mobil. "Pikir warga, kalau kita masuk dalam aliran ini kita akan kaya dan dapat beli mobil," terang Asrul.

Selain Sudirman, Asrul juga bercerita soal Syamsuddin salah seorang pengikut sudirman yang mengaku sebagai Nabi Khaidir. Asrul sendiri heran atas kabar yang menghampirinya itu. "Saya tambah heran waktu mendengar kabar dia mengaku sebagai Nabi, padahal dia kan alumni pesantren dan perguruan tinggi Islam," imbuhnya. Asrul dulunya adalah teman akrab Syamsuddin. "Saya banyak tahu lah dia. Soalnya, saya sering bersama beliau waktu kuliah di Makassar, orangnya pendiam dan tidak mau dekat sama perempuan."

Alumni UIN Alauddin Makassar 2009 ini juga mengatakan, "Waktu di Asrama dulu Syamsuddin mengaku sering mendapat bisikan. Waktu itu, teman saya Umar mengatakan kepada Syamsuddin jangan percaya, itu bisikan Syaitan," katanya menirukan ucapannya Umar. Keanehan Syamsudin, demikian kata Asrul, terjadi ketika Syamsuddin patah hati kepada seorang perempuan yang dia suka waktu KKN dulu.[]

HDH PUN DISESATKAN LAGI

Oleh: Marzuki Rais

Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, tanggal 1 Desember tahun 2009 kembali mengeluarkan fatwa sesat kepada jamaah *majelis ta'lim* Hidup Dibalik Hidup (HDH). Fatwa dikeluarkan karena dalam versi MUI, pengajaran al-Qur'an tanpa kaidah-kaidah tafsir seperti yang dilakukan jamaah HDH dapat menyesatkan umat.

Menurut KH Mukhlisin Muzarie M.Ag, kepala bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI Cirebon, kesesatan HDH karena meski mengakui syahadat tetapi tidak melaksanakan ajaran/syariat.

Kalau dirunut, pangkal dari fatwa MUI ini diawali dua tahun sebelumnya. Berawal dari Sabtu malam, 25 September 2007. Saat salah seorang pemimpin HDH, Mujoni memberikan ceramah safari Ramadhan di Mushalla al-Karomah Desa Kandawaru Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Di tengah menjelaskan salah satu ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 48 yang membahas masalah *syafa'at*, ia dihentikan oleh seseorang yang berasal dari luar HDH karena dianggap penjelasannya menyimpang. Bahkan lebih jauh dia meminta agar HDH tidak lagi mengadakan kegiatan di Musholla tersebut.

Setelah peristiwa itu, hampir sebulan lamanya, pengajian majlis HDH tidak lagi diadakan di desa Kandawaru.

Hingga suatu hari, pada 30 Nopember 2007, salah seorang Jama'ah HDH yang ada di desa Kandawaru menelpon salah seorang pengurus HDH, Rohasan agar diadakan pengajian di rumahnya. Di bawah rintik hujan, setelah *ta'jil*, menikmati makanan kecil untuk membatalkan puasa, Rohasan dan Amin datang ke rumah Bapak Tamim yang bersebelahan dengan musholla al-Karomah.

Namun, setelah Rohasan dan Amin datang, ternyata di rumah itu tidak ada satupun orang. Ditunggu hingga beberapa saat tak ada orang, Rohasan dan Amin berniat pulang. Baru beberapa langkah mereka



meninggalkan rumah, mereka dicegat oleh seorang pemuda yang keluar dari mushalla al-Karomah dan meminta keduanya untuk masuk ke mushalla.

Rohasan ternyata sudah ditunggu oleh seorang ustad dan jamaahnya di dalam mushalla itu. Rohasan lalu diminta menjelaskan kembali masalah *syafa'at*, sehingga perdebatan pun kembali terjadi. Akhir dari perdebatan, Rohasan dan Amin disuruh meminta maaf. Selesai dari situ, Rohasan beranjak. Namun, baru beberapa langkah keluar dari musholla, Rohasan dipukul kepalanya dengan kayu dan dikeroyok.

Sambil berusaha bertahan dari pukulan dan pentungan kayu, Rohasan terus berjalan hingga sampai ke jalan raya Cirebon-Tegal. Tak cukup memukul dengan pentungan, bahkan ada juga yang berteriak untuk membakar korban.

Karena kasus itu, beberapa minggu kemudian pengurus HDH itu dipanggil oleh kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat pemerintah setempat untuk dimintai keterangan. Namun, bukan keadilan yang didapat, justru mereka malah dituduh sebagai penyebar ajaran sesat. Akhir kejadian, Rohasan dan Amin malah diinapkan di kantor Polres Cirebon sampai tiga hari dengan alasan supaya terhindar dari amuk massa. Sementara kasus kekerasannya sendiri malah tak pernah diutus.

Selain soal *syafa'at*, persoalan lain adalah beredarnya *booklet* catatan percakapan antara Mujoni dengan Kusnandar yang

ditulis pada tahun 2001. Al-marhum Kusnandar adalah ketua HDH sebelum Mujoni. *Booklet* itu berisi tentang cerita perjalanan spiritual Kusnandar yang menurut Mujoni, hanya sebagai catatan pribadi dan tidak untuk disebar.

Isi *booklet* salah satunya adalah Kusnandar bercerita bahwa dia pernah bertemu dengan malaikat, merantau ke alam *barzakh*, *sidrotul muntaha* dan lain sebagainya. Atas dasar percakapan inilah, MUI, pemerintah dan masyarakat melihat bahwa HDH adalah sesat.

Menyebarnya *booklet*, demikian kata Rohasan, bermula dari Sukari, mantan kuwu Surajaya yang datang ke rumahnya. Pada malam minggu di bulan Juli tahun 2003. Sukari yang sebelumnya sering ikut berkumpul dalam majelis HDH, datang ke rumah Rohasan dan berniat untuk mengetahui lebih jauh tentang HDH. Pada saat itu Rohasan sedang membaca catatan (*booklet*) yang diberikan oleh Mujoni. Oleh Sukari catatan itu kemudian diminta untuk dibaca dan digandakan. Dari sinilah kemudian isu penyesatan terhadap HDH berkembang ke masyarakat.

Menurut Rohasan *booklet* hanya berupa catatan pribadi Mujoni yang diberikan kepadanya sebagai keponakan Kusnandar dan tidak disebar meskipun kepada jamaah HDH. Oleh karena itu, sampai saat ini banyak jamaah HDH yang tidak pernah tahu apa isi *booklet* tersebut. Namun, oleh pihak-pihak yang tidak suka terhadap HDH, *booklet* ini dijadikan sebagai alat untuk menyesatkan HDH.

Mendengar *majlis ta'lim* yang dipimpinnya dikatakan sesat, Mujoni merasa kaget dan dengan inisiatif sendiri, dia mencoba menjelaskan ke berbagai pihak terkait, seperti Polres, MUI, Bakorpakem, Muspika dan lain sebagainya mengenai apa dan bagaimana ajaran HDH tersebut.

Menurut Rohasan, setelah penjelasan ini, beberapa pihak memandang tidak ada unsur kesesatan dalam HDH. Namun MUI Kabupaten Cirebon memandang bahwa ajaran HDH mengarah pada kesesatan karena dalam memahami al-Qur'an tidak menggunakan kaidah-kaidah tafsir serta meyakini bahwa pemimpinnya menerima wahyu, melakukan Isra Miraj melewati surga dan neraka, berkunjung ke Sidratul Muntaha, serta tidak mengakui *syafa'at* Nabi. []

Pak Rohasan (Keponakan Kusnandar, Pendiri HDH)

HDH MUNCUL KARENA KEHAMPAAN SPIRITUALITAS

oleh: Marzuki Rais

Hidup Dibalik Hidup (HDH) adalah komunitas keagamaan atau *majlis ta'lim* yang masuk ke Cirebon pada tahun 2002, tepatnya di Desa Sigong Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.

Sampai saat ini, jama'ah HDH di Cirebon berjumlah 84 orang. HDH ini dibawa oleh seseorang yang bernama Mujoni Abdullah (64 tahun), warga Bekasi asal Jawa Timur. Ia kini adalah pimpinan *majlis ta'lim* HDH. Demikian cerita dari Pak Rohasan, salah satu pimpinan HDH Cirebon:

Komunitas ini, didirikan oleh Muhammad Kusnandar bin Amir, seorang warga Sigong Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon yang menghabiskan masa hidupnya di Jakarta. Beliau lahir tahun 1926 dan meninggal tahun 1998.

Kusnandar, nama kecilnya adalah Ugi Amir. Beliau memunculkan *majlis ta'lim* HDH karena keresahannya melihat masyarakat pada saat itu lebih mencintai kehidupan duniawi ketimbang memikirkan dan mengorientasikan hidupnya untuk kehidupan akhirat. Di samping itu, kemunculan HDH juga dilatari atas sikap kritis dan *tafakurnya* pak Kusnandar kepada Sang Pencipta. Setiap saat beliau selalu ingin bertemu Allah. Bahkan keinginannya untuk bertemu dengan Allah ini muncul sejak dia masih kecil, dimana dia pernah menanyakan kepada neneknya tentang siapa penciptanya. Jawaban neneknya yang mengatakan bahwa yang menciptakannya adalah Allah, membuat beliau setiap saat selalu ingin bertemu dengan Allah.

Kegelisahan bathin, pikiran serta keinginannya untuk bertemu Allah terus menyertai kehidupan Pak Kusnandar hingga pada suatu kesempatan, sekitar tahun 1974, pak Kusnandar kemudian

bertemu Mujoni di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Setelah saling kenal, antara pak Mujoni dengan pak Kusnandar sering melakukan diskusi dan sama-sama memiliki keresahan terkait dengan kehampaan spiritual yang ada di masyarakat. Karena itu, mereka kemudian membuat *majlis ta'lim* yang disebut dengan Hidup Dibalik Hidup (HDH). Pada awalnya HDH tidak



disebarkan kepada siapapun dan hanya mereka berdua yang mengamalkannya.

Namun, lambat laun diawali oleh keterlibatan keluarga, tetangga dan sahabat, akhirnya banyak orang yang bergabung dengan HDH dan sampai saat ini pengikut HDH tersebar hampir di seluruh pulau di Indonesia seperti Jawa, Kalimantan dan Sumatra. Sementara dari sisi jumlah, HDH diikuti oleh ratusan orang yang mayoritas berada di Jawa.

Setelah pak Kusnandar meninggal, kepemimpinan HDH dipegang pak Mujoni. Sebagai orang yang memiliki kesamaan dalam pemahaman keagamaan, pak Mujoni merasa bertanggungjawab untuk meneruskan dan mengamalkan serta menyebarkan pemahaman yang pernah dimunculkan oleh pak Kusnandar. Apalagi dalam pemahaman Pak Kusnandar, kepemimpinan HDH tidak harus diteruskan oleh keturunan, tapi dilanjutkan oleh orang yang mengerti dan memahami ajaran agama.

Salah satu ajaran HDH yang dipegang adalah dilarang mensekutukan Allah. Oleh karena itu untuk menjauhkan pengikutnya dari kekhawatiran mensekutukan Allah, sampai saat ini, Mujoni tidak pernah menceritakan dimana pak Kusnandar dimakamkan. Bahkan kerabatnya di Cirebon juga tidak ada yang mengetahui dimana kuburan pak Kusnandar.

Kami tidak pernah diceritakan dan diberitahu dimana kuburan pak Kusnandar? Hal ini dilakukan katanya, untuk menghindari pengkultusan individu yang dikhawatirkan akan muncul dari para pengikutnya. Sebab selama ini, pak Kusnandar selalu mengajarkan soal larangan mensekutukan Allah SWT. Sebagaimana selama ini terjadi, orang yang dianggap sebagai pemimpin keagamaan, selalu dianggap sebagai wali bahkan dianggap sebagai Nabi. Sehingga kemudian para pengikutnya berlebihan dalam memberikan penghormatan kepada dia, bahkan ada juga yang meminta berkah dengan mengambil tanah kuburannya.

Menyadari hal itu, Pak Kusnandar sejak awal mengajarkan kepada kami untuk menjauhkan sikap dan tindakan yang mengarah kepada kemusyrikan. Bahkan sampai-sampai beliau tidak mau disebut sebagai guru, kyai atau pemimpin HDH. []

“Tanah adat kami sudah banyak diklaim oleh perusahaan, dan juga kehadiran perusahaan tersebut tidaklah sama sekali membawa keberuntungan bagi kehidupan kami,” ungkapan kekusaran itu disampaikan oleh Ammatoa saat ditemui kontributor *Deport* 26 Januari 2010 lalu.

Sungguh bisa dimengerti kenapa orang yang dituakan di Tanah Toa Kajang ini mengatakan begitu. Sudah sejak lama, tanah adat mereka direcoki oleh orang luar dan sepertinya, pegangan yang mereka pakai sepertinya tak digubris oleh orang luar. Soal tanah juga begitu, selain tak lagi dikelola seperti aturan adat, tanah adat justru dinikmati oleh pendatang. “Justru kehadiran perusahaan tersebut merugikan warga masyarakat yang ada di Tanah Toa Kajang,” kata Ammatoa.

Desa Tanah Toa sendiri, terletak di bagian utara Kecamatan Kajang, berbatasan dengan wilayah kabupaten Sinjai. Luas wilayah desa Tanah Toa 1820 hektar yang terdiri dari sembilan dusun.

Padahal, bagi masyarakat Tanah Toa Kajang tanah adat adalah warisan dari leluhur yang harus dijaga kelestariannya. Hal ini karena bagi komunitas adat Kajang, tanah adalah bagian dari kosmologi yang harus dijaga dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Komunitas Tanah Toa tentu tak rela jika tanah yang selama ini menjadi bagian dari siklus kehidupan mereka, diganggu oleh orang luar, apalagi untuk kepentingan perusahaan. “Tanah Toa Kajang adalah tanah adat yang senantiasa harus dijaga dan dikelola sesuai dengan aturan adat dan tradisi kami sendiri tanpa harus ada intervensi dari luar, baik dari kalangan pemerintah maupun pengusaha,” terang Ammatoa.

Selain itu, perusahaan juga mengganti tanaman yang selama ini menjadi bagian dari adat Kajang. Seperti disampaikan Ammatoa, tanaman yang ada di tanah adat kini bukan lah tanaman yang diharapkan masyarakat Kajang seperti pohon karet. Atas tanaman karet itu, Ammatoa mengatakan, “Nyata-nyata tidak pernah kami lihat dan kenal sebelumnya serta tidak ada dalam *Pasang Ri Kajang* sebagai pedoman hidup kami,” paparnya.



MEMPERTAHANKAN TANAH TOA KAJANG

Oleh: Suaib Prawono

Okupasi Tanah Adat

Tetapi, keinginan untuk menjaga tanah, dan merawat seperti yang ada di *Pasang Ri Kajang* memang tak mudah. Mereka harus berhadapan dengan perusahaan perkebunan macam PT. London Sumatera (PT. Lonsum)

Jika menilik dari sejarah, keresahan yang dialami Ammatoa sudah begitu lama. Tanah Kajang telah dieksploitasi sejak zaman Belanda seperti yang dimiliki (PT. Lonsum). Lonsum, masuk Kajang sejak tahun 1919. Perusahaan itu, dulunya menggunakan nama NV Celebes Landbouw Maaschappij.

Perusahaan juga mengatakan bahwa tanah adat itu telah mereka sewa dari negara sehingga mereka berhak mengeksploitasinya. Klaim kemanfaatan yang membuat petani Kajang meradang sehingga komunitas adat melakukan

reclaiming. Puncaknya terjadi 21 Juli 2003, sengketa antara petani dengan PT Lonsum mengakibatkan setidaknya tiga petani Kajang meninggal saat mereka menuntut kembali tanah yang disewa PT Lonsum itu.

Atas segala yang terjadi ini pemerintah sendiri mendua. Para pejabatnya tak ambil peduli dengan nasib orang Kajang kecuali saat mereka punya kepentingan seperti menjelang Pilkada seperti sekarang. “setelah pilkada selesai persoalan ini tidak pernah lagi dibicarakan, ini hanya sekadar janji-janji politik belaka” ungkap Tamrin salah seorang warga Kajang Luar.

Menjelang musim Pilkada, Komunitas Kajang ramai dikunjungi oleh para kandidat dan berjanji kepada warga setempat bahwa tanah adat mereka akan diperjuangkan, “Namun hal tersebut tidak pernah terwujud sampai hari ini,” ungkap Tamrin kesal. []

Wawancara dengan Tamrin (warga masyarakat Kajang luar)

Harus Ada Kesolidan untuk Memperjuangkan Masyarakat Kajang

Oleh: Suaib Prawono

Apa dampak yang ditimbulkan oleh Kehadiran PT Lonsum di Tanah Toa Kajang?

Daerah atau wilayah adat Kajang semakin menipis dengan kehadiran PT Lonsum dan bahkan tanah adat Kajang hampir hilang karena semuanya sudah ditanami karet yang tentunya untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan masyarakat Kajang. Dan juga PT Lonsum banyak mengklaim tanah warga sebagai milik perusahaan, termasuk tanah milik Galla Kanta (pembantu Ammatoa yang dalam skala kenegaraan setingkat dengan

menteri) banyak tanah beliau di klaim oleh PT Lonsum. Dan bukan hanya itu, tanah-tanah yang telah diklaim oleh PT Lonsum dan terlanjur ditanami jagung oleh warga, ketika tiba waktu untuk menuai hasil panen, mereka diburu oleh pihak perusahaan, padahal itu jelas-jelas tanah adat mereka.

Bagaimana tanggapan pemerintah, sehubungan dengan persoalan ini?

Paling persoalan ini dibicarakan ketika pemerintah punya keinginan. Di pusat dan di daerah sering digaungkan bahwa masyarakat adat harus dilindungi dan dibela, tapi kenyataannya tidak demikian, malah masyarakat adat semakin terpuruk kehidupannya. Ya...taulah pemerintah, taunya hanya mengumbar janji ketika menjelang moment-moment tertentu seperti pilkada. Kemarin ada calon bupati yang berkunjung ke sini dan mengatakan bahwa "kalau saya terpilih nanti, saya akan menuntaskan persoalan PBB". Nah kalau ini yang terjadi masyarakat Kajang tidak akan dapat apa-apa, malah yang diuntungkan adalah mereka, tuan tanah termasuk perusahaan Lonsum. Masyarakat Kajang kan tidak mengenal urusan administrasi negara seperti PBB, karena di sini ada aturan tersendiri (aturan adat) yang harus diikuti.

Problema terbesar yang di alami masyarakat Kajang hari ini, apa saja pak Tamrin?

Ya itu tadi, yang diungkapkan oleh Ammatoa, tanah adat banyak dinikmati oleh pendatang yang dalam hal ini

adalah perusahaan PT Lonsum, padahal tanah adat kan tempat masyarakat kami mencari kehidupan karena semua masyarakat di sini bekerja sebagai petani. Belum lagi intervensi kekuasaan yang masuk secara halus dan meninabobokan mereka. Singkatnya, bagi saya, "demokrasi" sudah berhasil lah di Kajang, karena Kajang sudah bisa dimasuki oleh berbagai macam kepentingan dari luar dan mengaburkan identitas lokal Kajang.

Bagaimana dengan teman-teman yang selama ini intens mendampingi masyarakat Kajang?

Yang disayangkan adalah teman-teman tidak solid lagi seperti dulu, sekarang mereka saling mengklaim membela kelompok ini dan kelompok itu, tidak ada upaya penyatuan persepsi dari kawan-kawan untuk membebaskan Kajang dari hegemoni kekuasaan (politik) dan ekonomi.

Kedepan apa harapan Pak Tamrin?

Harus ada yang mampu memediasi Kajang untuk mempertemukan tokoh adat, eksekutif dan legislatif beserta masyarakat Kajang untuk menyelesaikan persoalan tanah adat. Upaya ini sangat kami harapkan karena kami juga tidak ingin terulang kembali tindakan anarkis dari warga masyarakat, seperti yang terjadi di tahun 2003 lalu. Kita juga berharap janji-janji politik waktu Pilkada lalu itu direalisasikan dan yang terpenting lagi adalah kesolidan kembali kawan-kawan untuk memperjuangkan masyarakat lokal Kajang.

Yang disayangkan adalah teman-teman tidak solid lagi seperti dulu, sekarang mereka saling mengklaim membela kelompok ini dan kelompok itu, tidak ada upaya penyatuan persepsi dari kawan-kawan untuk membebaskan Kajang dari hegemoni kekuasaan (politik) dan ekonomi.

Prof. Dr. Minhajuddin (Guru Besar UIN Alauddin Makassar)

“TANAH ADAT MILIK NEGARA”

Oleh: Suaib Prawono

Nampaknya persoalan tanah adat di Tana Toa Kajang Bulukumba Sulawesi Selatan masih menjadi polemik panjang yang tak berkesudahan sampai hari ini. Berbagai pandangan pun bermunculan dalam menyikapi persoalan tanah adat mereka.

Salah seorang guru besar UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Minhajuddin turut serta memberikan tanggapannya mengenai persoalan tanah adat Kajang tersebut. Ini yang dia sampaikan saat kami berkunjung ke kediamannya di jalan Manuruki dua.

“Hampir di semua wilayah Indonesia terdapat tanah adat, bukan hanya di Sulawesi Selatan atau di Kajang. Di

Ambon juga ada tanah adat dan terkadang menjadi tanah sengketa antara masyarakat dengan perusahaan, dan tanah adat itu milik bersama, dalam artian diatur oleh pemerintah,” ujar magister Alumni Pakistan ini.

Minhajuddin juga berkata bahwa tanah dapat dibagi dalam dua hal, yaitu tanah milik pribadi dan tanah milik bersama. Yang masuk dalam kategori tanah pribadi adalah tanah warisan, tanah wakaf dan hibah. Sedangkan tanah milik bersama, itu dikuasai oleh negara, termasuk tanah adat dan difungsikan sesuai dengan aturan pemerintah.

Lebih lanjut, pria kelahiran Palopo 31

Desember 1942 ini mengatakan bahwa dalam aturan agama kita (Islam) dikenal istilah “muamalah”, yaitu hubungan yang terjalin di antara sesama manusia dan tentunya diatur dengan berlandaskan pada aturan al-Qur’an dan Sunnah Rasul, demikian pula halnya dengan persoalan tanah adat, hal tersebut masuk dalam urusan muamalat, yang tentunya juga harus diatur sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menanggapi persoalan tanah adat di Kajang, yang diatur berdasarkan aturan adat dan tradisi keyakinan mereka (Kajang), Prof Minhajuddin sapaan akrab beliau, mengatakan bahwa itu tidak dibenarkan. Alasannya, karena bertentangan dengan al-Quran dan hadist Nabi. “Aturan tanah adat yang berlandaskan pada akidah atau keyakinan mereka (Kajang) itu tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan al-Quran dan hadist sebagai tuntunan hidup kita, dan juga tanah adat ketika di kuasai oleh Negara maka tanah adat itu menjadi milik bersama,” tegas guru besar bidang Syariah UIN ini.



Prof. Dr. Qasim Mathar (Guru Besar UIN Alauddin Makassar)

Negara Harus Menghargai Tanah Adat Kajang

Oleh: Suaib Prawono

Persoalan tanah adat di Tana Toa Kajang nampaknya belum menemukan titik cerah. Sampai hari ini, sebagian tanah adat mereka masih dikuasai oleh PT Lonsum, termasuk tanah adat yang mereka anggap sakral sebagai tempat untuk melakukan upacara adat dan ritual keagamaan.

Fenomena ini kayaknya sudah lazim terjadi di negara kita yang konon kaya akan kekayaan alamnya. Eksploitasi dan perampasan tanah adat oleh pihak perusahaan sebagaimana yang terjadi di Tana Toa Kajang sampai hari ini belum mampu diselesaikan oleh pemerintah secara bijak.

Memang, tanah adat selalu identik dengan tanah sengketa. Ironisnya, pemerintah yang diharapkan bisa menjadi penengah dari masalah tersebut terkadang berpihak ke pemilik modal. Apalagi ketika hal tersebut terkait

dengan persoalan administrasi Negara.

Hal tersebut juga diakui oleh Prof. Dr. Qasim Mathar, menurutnya tanah adat di Negara ini tidak pernah sunyi dari persoalan sengketa, “tanah adat memang selalu menjadi persoalan di Negara ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan administrasi atau dokumen tertulis” katanya.

Dalam komentarnya, Qasim Mathar juga mengatakan bahwa berbicara tentang dokumen tertulis hal itu pasti terkait dengan urusan pemerintah (Negara), “Jika sengketa terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan atau pemerintah urusannya pasti rumit karna terbentur pada persoalan administrasi (dokumen tertulis) dan kebanyakan tanah adat di Negara ini tidak punya dokumen tertulis, karena tanah adat hanya mengandalkan kesaksian dari masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, menurut guru besar UIN ini, “Jika urusannya terbentur pada persoalan dokumen, hal itu gampang saja dibuat oleh Negara dan pengusaha, sedangkan bagi masyarakat lokal tidak”, beliau juga menyatakan dengan tegas bahwa penyelesaian tanah adat dengan kekerasan bukanlah jalan terbaik dan tidak akan menyelesaikan persoalan, menurutnya pemerintah harus mengedepankan budaya santun dan dialog dalam menyelesaikan persoalan tanah adat Kajang.

Mencermati tentang paham lokal atau keyakinan masyarakat Kajang dalam mengatur urusan tanah adatnya, pria kelahiran Kabupaten Sidrap 21 Agustus 1947 ini mengatakan bahwa sebaiknya Negara menghormati paham lokal dan tanah adat Kajang beserta aturan adat dan tradisinya, “Ngapain kita bicara kearifan lokal kalau kenyataannya kita tidak mampu menghormati paham masyarakat lokal, termasuk urusan tanah adatnya,” terang beliau.

FITRI PUN BOLEH MEMAKAI JILBAB

Oleh: Ubaddul Adzkiya



NADIA ILMINA ARKEA

Peristiwa ini bermula di tahun 2005 lalu. Fitri Cahyaningsih, perempuan yang kini berusia 33 itu berketetapan memakai jilbab dalam kesehariannya termasuk saat bekerja. Tetapi, keinginannya untuk memakai jilbab itu tampaknya tak bisa ia lakukan saat bekerja karena ia terhalang oleh sistem di perusahaannya. Ia bekerja di rumah sakit Telogorejo yang memiliki aturan, karyawan tak boleh memakai penutup kepala apapun termasuk berjilbab saat bertugas.

Lalu, ia pun menggunakan cara begini: berangkat memakai jilbab, sampai RS di lepas, dan dipakai kembali saat ia pulang. Tetapi, ia tak betah dengan cara itu. Ia ingin menjalankan keyakinannya dengan tetap memakai jilbab. Maka, ia pun mengajukan izin tertulis ke pihak manajemen untuk memakai jilbab.

“Sejak tahun 2005 saya bongkar pasang mengenakan jilbab. Di tempat tugas saya harus lepas jilbab. Januari 2010 saya meminta izin mengenakan jilbab ketika bertugas. Upaya itu ditolak dan saya justru diintimidasi,” kata Fitri Cahyaningsih kepada VHRmedia. Setiap datang, ia hanya diminta menunggu di teras *house keeping*

hingga waktu pulang. “Sebagai pekerja saya butuh aktualisasi, bukan hanya didiamkan dan makan gaji buta seperti ini,” ujar Fitri.

Manajemen, melalui Nana Novienda sebagaimana ditulis antaranews, mengatakan, aturan mengenai penampilan saat bekerja di RS telegorejo ini tidak hanya diperuntukkan terhadap bagian kepala, tetapi juga seluruh bagian tubuh yang lain.

Menurut Nana, aturan yang ditetapkan oleh manajemen Telogorejo ini sudah disepakati bersama dengan pihak serikat pekerja rumah sakit ini. Ia menjelaskan bahwa ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak seseorang dalam menunaikan ajaran agama yang dianutnya. “Bagaimana pun, tiap perusahaan memiliki aturannya sendiri. Kami berharap karyawan dapat memberikan pelayanan optimal, tanpa menonjolkan agama tertentu,” katanya. Ia menjelaskan, dengan penampilan yang lebih netral, tentunya pelayanan yang diberikan dapat diterima oleh semua pihak.

Tetapi Fitri merasa bahwa dengan berjilbab tak menyalahi prosedur rumah sakit. Ia juga mengaku belum pernah

menandatangani surat perjanjian yang mencantumkan larangan memakai jilbab sewaktu bekerja. “Pas dulu saya masuk, saya belum memakai jilbab dan tidak tertera tentang larangan memakai jilbab dalam perjanjian yang saya tandatangani,” ujar Fitri kepada kontributor Deport.

Ia kemudian mengadu ke DPRD Jawa Tengah. Akibat aduan Fitri, media pun ramai-ramai memberitakan kasus ini. Gencarnya media membuat rumah sakit merespon pengaduan Fitri. Lalu, dengan difasilitasi DPRD, digelarlah pertemuan tripartit, keluarga Fitri, pihak rumah dan anggota dewan. Hasilnya, ia pun bekerja kembali di rumah sakit itu dengan tetap memakai jilbab. “Setelah pertemuan dengan DPRD saya sudah kembali bekerja seperti semula,” tuturnya.

Berkait dengan kasus Fitri, Nana Novienda, sebagaimana ditulis oleh Republika, menyampaikan bahwa ada tiga hal penting yang diambil pihaknya dalam mensikapi kasus Fitri ini. Yang pertama, jelasnya, masalah yang menyangkut karyawan bernama Fitri Cahyaningsih ini telah diambil alih oleh yayasan. Pihak yayasan, lanjutnya, juga telah menyatakan bahwa Fitri tetap bekerja dan melaksanakan kewajibannya di bagian Gizi.

“Khusus untuk penyelesaian kasus ini, Yayasan Kesehatan Telogorejo akan mempelajari permasalahan ini lebih lanjut dengan seksama dan akan mengambil sikap yang arif dan bijaksana,” jelasnya.

Fitri sendiri bersyukur karena ia dapat bekerja kembali. “Saya ingin bekerja nyaman dengan jilbab saya,” tandasnya. Saat diminta tanggapan atas kasus ini, Fitri berharap, ke depan perlakuan diskriminasi terhadap kasus serupa tidak terulang kembali.

Sebenarnya Fitri tak sendirian. Beberapa temannya juga melakukan seperti yang Fitri selama ini lakukan. “Mereka masih seperti biasanya, dengan cara bongkar pasang, yakni ketika sampai di Rumah sakit jilbab mereka dilepas, dan dipakai kembali ketika pulang,” terang Fitri.

Kongres ILGA Batal digelar di Surabaya

Oleh: Ingwuri Handayani

Kongres keempat International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans dan Intersex Association (ILGA), yang sedianya akan dilangsungkan di Surabaya 26-28 Maret 2010, tak jadi digelar. Tak digelarnya kongres ini, karena polisi tak memberikan izin dengan alasan keamanan. “Polisi tidak mengeluarkan izin kegiatan tersebut karena rawan,” ujar AKBP Sri Rahayu, Kabag Bina Mitra Polwiltabes Surabaya sebagaimana ditulis liputan6.

Tak hanya polisi yang tak memberi izin, kongres juga ditolak oleh pejabat negara lain. “Kami keberatan pelaksanaan kongres tingkat Asia. Banyak warga yang melayangkan protes,” papar Wakil Wali Kota Surabaya, Arif Afandi.

Selain dua institusi negara itu, tentangan juga muncul dari organisasi lain seperti Majelis ulama Indonesia (MUI), Lembaga Dakwah Kampus (LDK), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unair dan beberapa ormas Islam.

Front Pembela Islam (FPI) Surabaya, misalnya. Tak hanya menolak, FPI bahkan melakukan aksi sweeping hingga ke sekretariat Gaya Nusantara Jalan Mojo Kidul I No 11A Surabaya. Sweeping ini dilakukan untuk menegaskan dan memastikan agar International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dan Intersex Association (ILGA) ke-4 tingkat Asia, tidak digelar di Surabaya.

Selain FPI, Forum Umat Islam (FUI) Jawa Timur juga melakukan sweeping terhadap peserta kongres lesbian, gay dan biseks di Hotel Mercure, tempat semula rencana kongres mau dilangsungkan. Mereka, bahkan mendesak pihak hotel untuk membuat surat pernyataan kalau manajemen tidak mengizinkan untuk pelaksanaan kongres. Rencana penyelenggaraan kongres juga terus dipantau oleh FUI saat terdengar kabar,



panitia ILGA akan menggelar kongres di Kota Batu, Malang.

Sebenarnya, tak semua menolak rencana kongres ILGA. Ifdal Kasim, ketua Komnas HAM, sebagaimana ditulis kompas.com menyatakan, konferensi harus tetap dilakukan, karena kelompok marginal ini rentan terhadap diskriminasi dan harus mendapatkan perlindungan dan hak-haknya. Ifdal juga menjelaskan, bahwa hingga saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur hak kaum marginal, seperti gay dan lesbian. Mereka juga seharusnya diperlakukan sama sebagai warga negara yang juga mempunyai hak hidup sama dengan warga negara lainnya.

Sikap terbelah juga tampak dari anggota dewan legislatif Jawa Timur. Dukungan kongres ILGA muncul dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. “Prinsipnya, saya sangat menghormati dilaksanakannya konferensi ILGA di Surabaya,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim Sirmadji Tjondro Pragolo saat dikonfirmasi Kompas. Menurut Sirmadji, dalam UU di Indonesia telah dijelaskan, setiap orang wajib menghormati orang lain, termasuk menghormati HAM dalam memilih.

Yang menolak, seperti dilansir detik.com ini, “Secara tegas kami menolak dan meminta agar kongres itu dibatalkan. Perilaku seperti gay dan lesbian itu bahkan lebih berat dari zina,” ujar Wakil Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan

dan Reformasi, Mahdi, kepada wartawan di Gedung DPRD Jatim.

Disitus www.gayanusantara.co.id sendiri, disudut sebelah kanan atas, dituliskan: “Sehubungan dengan keadaan situasi yang kurang mendukung, maka 4rd ILGA-Asia Regional Conference diputuskan untuk dibatalkan.”

Sejarah ILGA

Dalam pres releasenya disebutkan, International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Association (ILGA) adalah federasi organisasi-organisasi lesbian, gay, bisexual dan transgender (LGBT) yang terbesar di dunia.

Berawal dari pendirian International Gay Association (IGA) di tahun 1978 yang bertujuan untuk membangun jaringan dan bertukar pengalaman di antara kelompok-kelompok aktivis gay di benua Eropa. Lalu, federasi ini diperluas sehingga mencakup kelompok-kelompok lesbian. Karena itulah, pada 1986 IGA berubah menjadi ILGA.

Dengan semakin pesatnya perkembangan berjejaring, maka dimulailah pertemuan-pertemuan regional: Asia, Afrika, Amerika Latin & Karibia [LAC], Amerika Utara, Eropa dan Australi-Selandia Baru-Kepulauan-kepulauan Pasifik [ANZAPI]. Sekarang ILGA mewakili lebih dari 560 organisasi LGBT yang tersebar di 90 negara.

Di asia sendiri, pertemuan ILGA dimulai di Mumbai tahun 2002. Sempat non-aktif selama 4 tahun, pertemuan berikutnya digelar di Cebu, Filipina dan yang ketiga digelar tahun 2008 diselenggarakan di Chiang Mai, Thailand. Di Chiang Mai sendiri, juga untuk pertama kali terpilih satu Dewan Pengurus ILGA-Asia yang terdiri dari 10 anggota dari berbagai negara.[]

Kejanggalan-Kejanggalan Film Mengaku Rasul

Oleh: Much Nurul Huda

Sejak sebelum menonton film ini, saya sudah bersuudzan bahwa yang mengaku Rasul dalam film itu, pastilah tak jauh-jauh dari pria mata keranjang, doyan kawin dan hobi meniduri perempuan. Dugaan yang tak jauh-jauh dari yang saya kira, karena dalam film yang diproduksi tahun 2008 itu, memang tak jauh dari gambaran itu.

Suudzan saya yang lain, para pengikut yang ditampakkan dalam film, pastilah seperti patung berbentuk manusia yang menunduk, pasrah dan menyembah. Benar saja, suudzan saya menemukan membenaran itu karena begitulah jalan cerita dari film *Mengaku Rasul (Sesat)*.

Menonton film ini, akan mengingatkan kita akan film lawas tahun 1985 berjudul *Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar*. Bermula dari Guru Samir, pemilik padepokan yang mengaku sebagai Rasul. Ia, sebagaimana di awal film mengatakan dalam khotbahnya bahwa dalam setiap masa, selalu ada utusan dan saat inilah ia yang menjadi rasul karena ia mendapatkan wahyu. Bagi yang percaya Guru Samir (Rae Sahetapy) sebagai rasul, ia dijamin masuk surga.

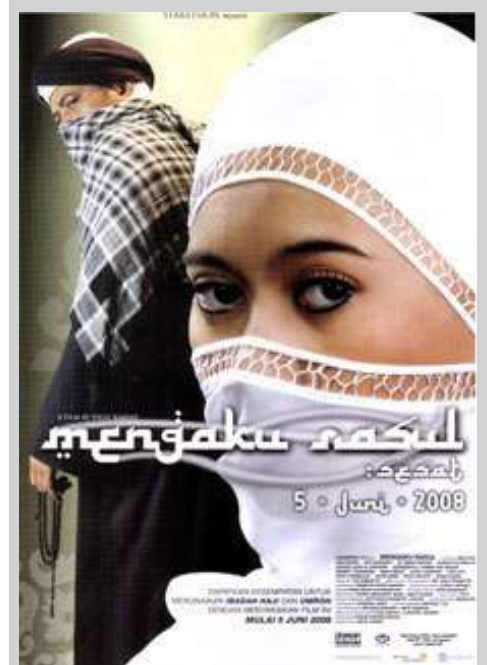
Dari situ, jalinan cerita diuntai lengkap dengan kejanggalan-kejanggalan. Kejanggalan? Iya. Bagaimana tidak, penghapusan dosa dan jaminan masuk surga dilakukan dengan cara membeli sertifikat yang memiliki stratifikasi berjenjang macam tiket kereta. Ada kelas ekonomi ada eksekutif sesuai dengan uang yang disetorkan.

Di bagian agak awal, isi film juga digambarkan bahwa Guru Samir memiliki kesaktian. Guru Samir bisa berada di dua tempat, misalnya saat ia diintip oleh aji (Alblen) yang curiga atas kelakuan guru samir. Tetapi, di akhir film, ternyata guru samir tak memiliki kesaktian sama sekali. Ia terbunuh oleh Rianti (Jian Batari) saat malam pertama. Guru Samir rupanya selama ini cuma mengorbankan saudara kembarnya, Ki Baehaki yang rela sampai rela dipotong tangan dan dibakar.

Mungkinkah seseorang begitu rela untuk memberikan tangannya, juga tubuhnya sebagai tumbal meski untuk saudara kembarnya? Padahal pula, di awal-awal film, posisi yang jelas ditunjukkan atas keberbedaan antara Guru Samir dengan Ki Baehaki dalam mengambil hati muridnya. Ki Baehaki kerap memberikan kritik atas cara guru Samir yang keblinger. Tetapi kenapa ia malah begitu rela sehingga menyerahkan tangannya? Kenapa pula ki Baehaki menyuruh warga untuk membakar padepokan?

Film yang dibintangi oleh Ray Sahetapy, Vonny Cornelia, Jian Batari, Muhammad Ihsan Tarore, Hengky Tornando, dan Baby Zelvina ini juga menunjukkan bahwa perempuan tak memiliki kuasa apa-apa sehingga ibu nyai mau saja diperistri Guru Samir tanpa melihat latar belakang Guru Samir sebelum menjadi suaminya.

Film ini, semula ditujukan untuk membidik penonton Islam yang saat itu sedang berkembang aliran-aliran yang dianggap sesat. Tetapi tampaknya film ini



Judul film : mengaku rasul (sesat)
Putar perdana : 2008
Pemain : Ray Sahetapy
Vonny Cornellya
Jian Batari
M. Ihsan Tarore
Hengky Tarnando
Baby Zelvina
Alblen Fillindo Fabe
Sutradara : Helfi Kardit
Penulis : Taufik Daraming Tahir
Helfi Kardit

tak mendapat respon dari penggemar film Indonesia. Ia tak setenar film *Ayat-Ayat Cinta* atau film *Emak ingin Naik Haji*.

Mungkin, penonton memiliki suudzon seperti saya sehingga tak menonton film ini pun tak kurang suatu apa. Tetapi, kalau dirasa memang tak salah kalau tak menonton film ini. Kenapa? Karena film ini seperti mensahkan kekerasan atas keberbedaan. Sehingga, terhadap yang disebut sesat itu, cara pemberantasannya dengan dilenyapkan.

Lepas dari sisi-sisi kejanggalan itu, pertanyaan ini tampaknya menarik diajukan. Mungkin nggak sih jika sekarang muncul seseorang yang mengaku mendapat wahyu dan ia tak memiliki cacat moral? Meski toh tetap saja, siapapun yang mengaku mendapat wahyu apalagi mengaku nabi, akan mendapat tentangan keras dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ini.[]

JUDICIAL REVIEW

UNDANG-UNDANG PENODAAN AGAMA

Oleh: Novi Yana

Sejak tanggal 20 Oktober 2009, tujuh Badan Hukum dan perorangan yang tergabung Tim Advokasi Kebebasan Beragama (TAKB) mengajukan Permohonan Pengujian Materiil UU No. 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama diujikan terhadap Undang-undang Dasar 1945. Pasal yang diujikan diantaranya, Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 3, dan Pasal 4 terutama point a.

Ketujuh badan hukum dan perorangan tersebut adalah Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi dan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS),

Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Yang perorangan, (mendiang) Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Rahardjo dan Maman Imanul-Haq

Hampir sebulan berikutnya, tanggal 17 November 2009, atas perkara bernomor 140/puu-vii/2009 ini, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan pendahuluan. Atas beberapa revisi, sehingga pada tanggal 2 Desember 2009 dilakukan pemeriksaan perbaikan. Lalu, sejak tanggal 10 Februari, setiap hari Rabu digelarlah sidang untuk mendengarkan keterangan para saksi baik dari pemohon, dari pemerintah maupun pihak terkait, sebulan berikutnya malah digelar tiap Rabu dan Jum'at hingga tanggal

24 maret 2010 putusan sidang akan dikeluarkan akan dikeluarkan sekitar bulan Mei 2010.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Muh. Mahfud MD sendiri, mengatakan, akan melakukan kajian secara serius terhadap uji materi PNPS. Keseriusan MK misalnya, mendatangkan banyak saksi ahli seperti Prof. Jalaluddin Rahmat, Prof. Ahmad Fedyani Saifuddin, Dr Siti Zuhro, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra prof, Komarudin Hidayat, Dr. Muslim Abdurrahman hingga budayawan macam Emha Ainun Najib dan Taufik Ismail. Tingkat keseriusan pemohon juga ditunjukkan hingga menghadirkan saksi ahli Cole W Dunham, pakar hak asasi manusia dari universitas Harvard Amerika Serikat via teleconference.[]



BERLATIH MENULIS DI KALIMANTAN TIMUR

Oleh: Novi Yana

mengundurkan diri, tetapi pengunduran diri lebih karena persoalan teknis.

Dalam evaluasi misalnya, peserta mengatakan pelatihan ini merupakan sesuatu yang baru, yang belum pernah mereka dapat sebelumnya. Dari hasil pembicaraan peserta, panitia dan fasilitator, pelatihan juga akan diteruskan dengan memantapkan tema-tema yang ditulis peserta dan dipertajam supaya menjadi tulisan yang utuh.

Sebelum workshop, peserta diminta untuk membuat abstraksi. Abstraksi ini sedianya menjadi bahan bagi peserta untuk membuat kerangka tulisan sekaligus kritikan dari fasilitator dan peserta sehingga tulisan menjadi tajam dan fokus. Selain itu, mungkin biasanya, penelitian dan penulisan biasanya dilakukan oleh kampus sehingga karena dilakukan oleh

NGO's, menjadi point tersendiri.

Beberapa tema diantaranya, ada peserta yang menulis soal kuliner yang dikaitkan dengan etnisitas. Ia melihat, background etnis membentuk selera kuliner sendiri. Contoh yang lain, ada peserta yang menghubungkan antara ekosistem dengan buaya. Hancurnya ekosistem, membuat buaya di sepanjang aliran sungai di daerah penulis membuat buaya marah dan hampir tiap hari, ada orang dimakan buaya. rantai makanan yang terputus akibat limbah pabrik, membuat buaya menjadikan manusia sebagai mangsa.

Di akhir acara, para peserta juga melakukan diskusi dengan harian Tribun Kaltim yang melihat format ini bahkan menyediakan ruang kepada peserta untuk menulis. Para peserta akan melakukan pertemuan dua mingguan.[]

Sejak tanggal 10 hingga 20 Maret 2010, Desantara bekerja sama dengan Nawaldwipa menyelenggarakan pelatihan menulis yang bertema Sekolah Multikultural. Acara yang diselenggarakan di Samarinda, Kalimantan Timur ini berjalan sukses meski ada perubahan peserta.

Dari 17 peserta yang mengirimkan abstraksi kurang dari separuhnya mengundurkan diri sehingga diganti peserta lain. Tetapi meski berubah pesertanya tak mengurangi hasil yang ditargetkan. Hingga hari terakhir, peserta rajin hadir dalam setiap sesinya. Memang ada satu dua peserta yang